

Pengaruh Prinsip *Good Governance* terhadap Peningkatan Asli Daerah Melalui Tata Kelola Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Batee Puteh Kabupaten Aceh Barat

Muhammad Fadhil*, Zulkarnaini, Zulkarnain

Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru

e-mail: muhammad.fadhil8897@unri.ac.id*,
zul.karnaini@lecturer.unri.ac.id, zulkarnain.z@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

Tourism is a strategic sector with great potential to drive regional economic growth and increase Local Revenue (PAD). In various regions, tourism is seen as a driving force for development, but its contribution is often not optimal. This is generally due to weak governance, minimal community involvement, and inconsistent application of Good Governance principles. Experience in several regions shows that without good governance, significant tourism potential cannot deliver significant economic impact. This study aims to empirically analyze the influence of the principles of good governance which include participation, transparency, accountability, effectiveness & efficiency, and responsiveness on the governance of the development of the Batee Puteh Beach tourism area, as well as its implications for increasing PAD in West Aceh Regency. This study uses a quantitative approach with the SEM-PLS method. Data were obtained from 63 respondents selected through purposive sampling, consisting of business actors, local communities, and relevant stakeholders. The research instrument was a questionnaire with a five point Likert scale, and the analysis was conducted using SmartPLS software through the stages of outer model testing, inner model testing, and mediation effect analysis. The results of the study indicate that all Good Governance indicators have a positive and significant effect on governance and PAD, with the strongest pathway being the responsiveness indicator. The governance variable has been proven to play a significant mediating role in strengthening the influence of Good Governance on PAD. Thus, increasing PAD in West Aceh Regency does not only depend on its tourism potential, but also on the quality of tourism governance that consistently applies the principles of Good Governance. The implications of this study emphasize the need for local governments, business actors, and the community to strengthen tourism governance based on the principles of good governance so that the tourism sector can make a sustainable contribution to the regional economy.

Keywords : *Good Governance, Tourism Development Governance, Local Revenue*

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di berbagai daerah, pariwisata dipandang sebagai motor penggerak pembangunan, namun kontribusinya sering kali belum optimal. Hal ini umumnya disebabkan oleh lemahnya tata kelola, minimnya keterlibatan masyarakat, serta belum konsistennya penerapan prinsip *Good Governance*. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang baik, potensi wisata yang besar tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh prinsip *Good Governance* yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi, serta daya tanggap

terhadap tata kelola pengembangan kawasan wisata Pantai Batee Puteh, serta implikasinya pada peningkatan PAD di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode SEM-PLS. Data diperoleh dari 63 responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, terdiri atas pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan terkait. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert lima poin, dan analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS melalui tahapan uji *outer model*, *inner model*, serta analisis efek mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola dan PAD, dengan jalur terkuat pada indikator daya tanggap. Variabel tata kelola terbukti berperan sebagai mediator signifikan yang memperkuat pengaruh *Good Governance* terhadap PAD. Dengan demikian, peningkatan PAD di Kabupaten Aceh Barat tidak hanya bergantung pada potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga pada kualitas tata kelola pariwisata yang konsisten menerapkan prinsip *Good Governance*. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat tata kelola pariwisata berbasis prinsip tata pemerintahan yang baik agar sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap perekonomian daerah.

Kata kunci: *Good Governance*, Tata Kelola Pengembangan Wisata, Pendapatan Asli Daerah.

Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Secara global, industri pariwisata telah menjadi salah satu penyumbang utama PDB dan lapangan kerja, serta sumber devisa bagi banyak negara (Telfer dan Sharpley, 2019; Goeldner dan Ritchie, 2021). Bagi pemerintah daerah, pariwisata menawarkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel, restoran, retribusi objek wisata, dan aktivitas ekonomi turunan lainnya. Di Indonesia sendiri, sektor pariwisata diprioritaskan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, terutama pasca desentralisasi yang memberi kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola potensi wisatanya (Kuncoro, 2018). Pemerintah Aceh, misalnya, melihat pariwisata sebagai sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah, dengan berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan destinasi unggulan serta menarik wisatawan (Ernawati, 2022).

Meskipun potensinya besar, kontribusi pariwisata terhadap PAD di banyak daerah masih belum optimal. Hal ini kerap disebabkan oleh berbagai kendala tata kelola, seperti perencanaan yang lemah, kurangnya keterlibatan masyarakat, transparansi rendah, hingga minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan destinasi (Abdussamad, 2021). Studi kasus di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan pariwisata daerah berkontribusi pada tidak tercapainya target PAD sektor wisata dan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan (Abdussamad, 2021). Kondisi serupa ditemukan di berbagai daerah lain, di mana potensi objek wisata yang menjanjikan tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik, sehingga dampak ekonominya bagi daerah relatif kecil. Di Aceh Selatan, misalnya, sektor pariwisata baru menyumbang sebagian kecil dari total PAD. Namun, tren positif mulai terlihat: selama tiga tahun terakhir, PAD dari sektor pariwisata di Aceh Selatan terus meningkat dan secara akumulatif telah menyumbang lebih dari Rp2 miliar, seiring pembenahan

regulasi dan pengelolaan destinasi oleh pemerintah setempat (Kanalinspirasi, 2025). Fakta ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan tata kelola dapat berkontribusi nyata pada peningkatan penerimaan daerah.

Konsep *Good Governance* menjadi kerangka penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola pariwisata daerah. *Good Governance* mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta daya tanggap (responsivitas) (United Nations ESCAP, 2009; Sedarmayanti, 2012). Kelima prinsip ini saling terkait dan saling memperkuat, membentuk landasan tata kelola yang menjamin proses pembangunan berjalan inklusif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pariwisata, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* berarti pengembangan destinasi wisata dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan yang transparan, penggunaan sumber daya yang optimal, pertanggungjawaban kinerja, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal dengan cepat (Bramwell dan Lane, 2011). Penelitian telah menunjukkan bahwa destinasi wisata yang dikelola dengan melibatkan komunitas dan stakeholder secara partisipatif cenderung lebih berkelanjutan dan sukses, karena kebijakan yang diambil memiliki legitimasi dan dukungan luas (Setokoe dkk., 2019). Sebaliknya, destinasi yang dikelola secara tertutup dan tidak akuntabel rentan mengalami konflik, penurunan kualitas layanan, hingga kegagalan mencapai target ekonomi (Nurfaishal, 2018; Abdussamad, 2021).

Penerapan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar *Good Governance* terbukti dapat meningkatkan kinerja pengelolaan pariwisata. Melibatkan

masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengawasan pengembangan wisata memperkuat rasa memiliki dan kontrol sosial terhadap destinasi, sehingga kebijakan yang dijalankan lebih tepat sasaran (Bramwell dan Lane, 2011). Studi di berbagai daerah menunjukkan partisipasi komunitas berhubungan positif dengan keberhasilan destinasi wisata berbasis masyarakat (Setokoe dkk., 2019). Di Kabupaten Aceh Barat, partisipasi aktif kelompok sadar wisata lokal terbukti mampu meningkatkan kunjungan dan kepatuhan terhadap retribusi, yang pada akhirnya mengoptimalkan penerimaan PAD sektor pariwisata (Ernawati, 2022). Selain partisipasi, transparansi dalam pengelolaan juga krusial, keterbukaan informasi mengenai rencana pengembangan, penggunaan anggaran, dan capaian kinerja destinasi akan membangun kepercayaan publik (Nurfaishal, 2018). Dengan transparansi yang baik, masyarakat dan pelaku usaha lebih terdorong untuk mendukung program wisata dan mematuhi kewajiban fiskal seperti pajak dan retribusi, karena mereka mengetahui manfaatnya kembali ke pembangunan daerah (United Nations ESCAP, 2009). Penelitian di tingkat daerah mengonfirmasi bahwa pemerintah dengan tata kelola pariwisata yang transparan dan akuntabel umumnya memiliki kinerja fiskal lebih baik, termasuk pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dari sektor tersebut (Ernawati, 2022).

Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap aspek pengelolaan pariwisata. Pemerintah daerah dan pengelola destinasi wajib memastikan bahwa setiap program dan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (Sedarmayanti, 2012). Akuntabilitas yang tinggi akan mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan meningkatkan kepercayaan investor

maupun wisatawan. Menurut Kuncoro (2018), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan prasyarat kemandirian fiskal; artinya, daerah yang mengelola sektor wisatanya secara akuntabel lebih mampu memanfaatkan pendapatan wisata untuk pembangunan tanpa bergantung berlebihan pada pusat (Kuncoro, 2018; Suwanda, 2018). Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian di Aceh Barat yang menemukan penguatan sistem akuntabilitas (misalnya melalui pelaporan terbuka dan evaluasi rutin pada dinas pariwisata) berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kontribusi pariwisata dalam PAD (Ernawati, 2022). Demikian pula, efektivitas dan efisiensi menjadi prinsip yang tidak kalah penting. Efektivitas menjamin bahwa program pengembangan pariwisata mencapai sasaran (misal peningkatan kunjungan atau kepuasan wisatawan), sedangkan efisiensi memastikan sumber daya (dana, SDM, waktu) digunakan seoptimal mungkin (Sahira dan Zulkarnaini, 2023). Penerapan prinsip ini terlihat dalam contoh promosi wisata yang terarah dan pengelolaan anggaran destinasi yang hemat namun tepat guna, yang mampu mendongkrak kunjungan sekaligus menekan pemborosan (Supriyanto dkk., 2024). Adapun daya tanggap (responsivitas) mencerminkan kesiapan pemerintah merespons keluhan dan kebutuhan stakeholder pariwisata secara cepat. Respons yang sigap terhadap isu fasilitas, keamanan, maupun layanan wisata akan meningkatkan kepuasan pengunjung dan citra destinasi (United Nations ESCAP, 2009). Sebagai contoh, sebuah studi di Aceh Barat melaporkan bahwa perbaikan fasilitas wisata pantai yang dilakukan segera setelah mendapat masukan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya kenyamanan wisatawan, pendapatan pedagang lokal, dan retribusi daerah (Suwilma dan Abdi, 2022). Dengan demikian, kelima prinsip *Good Governance* tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

kualitas tata kelola pengembangan pariwisata dan capaian ekonominya bagi daerah.

Pantai Batee Puteh di Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu contoh destinasi wisata yang membutuhkan tata kelola berbasis *Good Governance* agar potensinya dapat dioptimalkan. Namun, untuk menjadikan kawasan wisata ini motor penggerak ekonomi daerah, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat Gampong, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka prinsip-prinsip *Good Governance*. Penerapan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan daya tanggap secara konsisten diharapkan dapat memperkuat tata kelola pengembangan Pantai Batee Puteh, seperti melalui forum musyawarah perencanaan wisata, publikasi rencana dan laporan pengelolaan, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, serta mekanisme tanggap cepat terhadap kebutuhan infrastruktur dan pelayanan. Dengan tata kelola yang baik, destinasi Pantai Batee Puteh diyakini mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, mendorong munculnya usaha-usaha ekonomi lokal (homestay, kuliner, kerajinan), dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PAD Aceh Barat secara berkelanjutan (Ernawati, 2022; Suwilma dan Abdi, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat kaitan erat antara prinsip-prinsip *Good Governance* dan keberhasilan pengelolaan pariwisata daerah. Kesenjangan riset yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* berpengaruh terhadap tata kelola pengembangan kawasan wisata dan implikasinya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian sebelumnya umumnya menyoroti salah satu aspek *governance* atau studi kasus terbatas; oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang

komprehensif untuk mengukur pengaruh masing-masing prinsip (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi, dan daya tanggap) terhadap kinerja tata kelola destinasi wisata serta dampak lanjutannya pada PAD. Penelitian ini secara khusus akan menganalisis pengaruh langsung prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap tata kelola pengembangan Kawasan Wisata Pantai Batee Puteh di Aceh Barat, serta kontribusi tidak langsungnya melalui tata kelola

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM-PLS) untuk menganalisis hubungan antar variabel penelitian. Populasi penelitian adalah pelaku usaha, masyarakat sekitar, serta pemangku kepentingan terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Batee Puteh Kabupaten Aceh Barat. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 63 orang.

Variabel yang diteliti meliputi: (1) Lima (5) Prinsip *Good Governance* yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi, serta responsivitas; (2) Tata Kelola Pengembangan Kawasan Wisata; dan (3) Pendapatan Asli Daerah

Hasil dan Pembahasan

Analisis model struktural dengan SEM-PLS menunjukkan bahwa variabel Tata Kelola Pengembangan Kawasan Wisata memiliki nilai R^2 sebesar 0,841, sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh R^2 sebesar

tersebut terhadap peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat. Harapannya, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pariwisata yang berorientasi pada *Good Governance*, sehingga pengembangan destinasi wisata tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, tetapi juga optimal dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian fiskal daerah.

(PAD) sebagai variabel dependen (Total 7 Variabel). Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden. Kuesioner disusun menjadi 28 pernyataan berdasarkan indikator yang ada dari masing-masing variabel, untuk mengukur konstruk dari penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS, melalui tahapan uji outer model (validitas dan reliabilitas), inner model (nilai R^2 , Q^2 , dan FIT), serta pengujian hipotesis dan efek mediasi. Pemilihan SEM-PLS didasarkan pada kemampuannya menangani model kompleks dengan jumlah sampel relatif kecil, serta kelonggaran asumsi distribusi data.

0,800. Angka ini mengindikasikan bahwa 84,1% variasi tata kelola dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip *Good Governance*, dan 80,0% variasi PAD dijelaskan oleh tata kelola serta *Good Governance*.

Tabel 1. Pengujian R²

	R- Square
Tata Kelola Pengembangan Wisata	0.841
Peningkatan PAD	0.800

(Sumber: Diolah Menggunakan Smart PLS)

Nilai R² di > 0,75 menunjukkan kekuatan model dalam menjelaskan variabel endogen (Hair dkk., 2019). Hasil ini memperkuat temuan Ernawati (2022) yang menyatakan bahwa tata kelola pariwisata berperan penting dalam

meningkatkan kontribusi PAD di Aceh Barat. Selanjutnya, pengujian relevansi prediktif menghasilkan nilai Q² sebesar 0,700 untuk Tata Kelola dan 0,688 untuk PAD, yang seluruhnya lebih besar dari nol.

Tabel 2. Pengujian Q²

	Q – Square (1- SSE/SSO)
Tata Kelola Pengembangan Wisata	0.700
Peningkatan PAD	0.688

(Sumber: Diolah Menggunakan Smart PLS)

Nilai Q² positif menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang baik (Chin, 1998). Temuan ini sejalan dengan Supriyanto dkk. (2024) yang menegaskan bahwa model dengan Q²

positif dapat dijadikan dasar validasi dalam penelitian pariwisata.

Pengujian kesesuaian model (goodness of fit) memperlihatkan bahwa nilai SRMR sebesar 0,052, sehingga dapat dikategorikan lay

Tabel 3 . Pengujian Goodness of Fit Model

	Estimated Model
SRMR	0.052

(Sumber: Diolah Menggunakan Smart PLS)

Nilai SRMR < 0,10 menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian struktural yang baik (Henseler & Sarstedt,

2013). Hal ini juga konsisten dengan Abdussamad (2021) yang menekankan pentingnya penerapan *Good Governance*

untuk meningkatkan kinerja pariwisata daerah. Hasil pengujian jalur (path coefficient) memperlihatkan bahwa seluruh indikator *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Tata Kelola, dengan nilai t-statistic di atas $> 2,0$ dan *p values* $< 0,05$. Selain itu, Tata Kelola juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Tabel 4 . Hasil Uji Path Coefficient

Uraian	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	P Values	f-Square
Partisipasi → Tata Kelola Pengembangan Wisata	0.332	0.329	0.057	5.830	0.000	0.635
Partisipasi → Peningkatan PAD	0.267	0.272	0.097	2.752	0.006	0.195
Transparansi → Tata Kelola Pengembangan Wisata	0.384	0.376	0.072	5.352	0.000	0.873
Transparansi → Peningkatan PAD	0.277	0.273	0.109	2.552	0.011	0.192
Akuntabilitas → Tata Kelola Pengembangan Wisata	0.349	0.347	0.042	7.134	0.000	0.723
Akuntabilitas → Peningkatan PAD	0.196	0.193	0.082	2.404	0.016	0.105
Efektivitas dan Efisiensi → Tata Kelola Pengembangan Wisata	0.443	0.437	0.060	7.397	0.000	1.176
Efektivitas dan Efisiensi → Peningkatan PAD	0.179	0.171	0.072	2.483	0.013	0.070
Daya Tanggap → Tata Kelola Pengembangan Wisata	0.480	0.473	0.060	7.986	0.000	1.390
Daya Tanggap → Peningkatan PAD	0.185	0.177	0.074	2.519	0.012	0.069
Tata Kelola Pengembangan Wisata → Peningkatan PAD	0.376	0.377	0.148	2.541	0.011	0.112

(Sumber : Diolah Menggunakan Smart PLS)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa jalur paling kuat adalah Daya Tanggap → Tata Kelola ($t = 7,986$; $p = 0,000$), diikuti oleh Efektivitas & Efisiensi ($t = 7,397$; $p = 0,000$) dan Akuntabilitas ($t = 7,134$; $p = 0,000$). Seluruh jalur signifikan dengan $p < 0,05$. Hasil ini memperkuat studi Bramwell & Lane (2011) yang menekankan pentingnya partisipasi dan transparansi

dalam tata kelola destinasi wisata, serta sejalan dengan Sedarmayanti (2012) yang menegaskan bahwa akuntabilitas dan efektivitas merupakan pilar utama tata kelola publik yang efektif.

Selain pengaruh langsung, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa Tata Kelola berperan sebagai mediator signifikan antara *Good Governance* dan PAD.

Tabel 5. Hasil Uji Mediasi

Uraian	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	P Values
Partisipasi → Tata Kelola Pengembangan Wisata → Peningkatan PAD	0.125	0.121	0.046	2.727	0.006
Transparansi → Tata Kelola Pengembangan Wisata → Peningkatan PAD	0.144	0.142	0.066	2.198	0.028
Akuntabilitas → Tata Kelola Pengembangan Wisata → Peningkatan PAD	0.131	0.129	0.051	2.565	0.010
Efektivitas dan Efisiensi → Tata Kelola Pengembangan Wisata → Peningkatan PAD	0.166	0.165	0.069	2.415	0.016
Daya Tanggap → Tata Kelola Pengembangan Wisata → Peningkatan PAD	0.180	0.178	0.074	2.450	0.014

(Sumber: Diolah Menggunakan Smart PLS)

Hasil menunjukkan bahwa seluruh jalur mediasi signifikan ($t > 2,0$; $p < 0,05$). Jalur terkuat terdapat pada Daya Tanggap → Tata Kelola → PAD ($t = 2,450$; $p = 0,014$) dan Efektivitas & Efisiensi → Tata Kelola → PAD ($t = 2,415$; $p = 0,016$). Hasil ini mendukung pendapat Sedarmayanti (2012) bahwa tata kelola merupakan instrumen kunci untuk menerjemahkan prinsip *Good Governance* ke dalam capaian pembangunan. Penelitian

ini juga selaras dengan Suwilma & Abdi (2022) yang menemukan bahwa tata kelola objek wisata berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan retribusi daerah.

Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan PAD, dengan tata kelola pariwisata sebagai mediator yang

memperkuat pengaruh tersebut. Dengan demikian, peningkatan PAD melalui sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pengembangan kawasan wisata Pantai Batee Puteh, dan pada gilirannya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai R^2 sebesar 0,841 untuk tata kelola dan 0,800 untuk PAD menegaskan kekuatan model penelitian ini dalam menjelaskan variabel endogen. Selain itu, nilai Q^2 positif (0,700 untuk tata kelola dan 0,688 untuk PAD) memperlihatkan relevansi prediktif yang baik, sedangkan nilai SRMR sebesar 0,052 mengonfirmasi kesesuaian struktural model.

Hasil uji jalur membuktikan bahwa seluruh indikator *Good Governance* partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi, serta daya tanggap berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola, dengan jalur terkuat pada indikator daya tanggap. Tata kelola juga terbukti signifikan dalam memengaruhi PAD, sekaligus berperan sebagai mediator yang memperkuat pengaruh *Good Governance* terhadap PAD. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola berbasis prinsip *Good Governance* menjadi kunci dalam mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. (1) Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola pariwisata dengan konsisten menerapkan prinsip *Good Governance*, khususnya aspek daya tanggap serta efektivitas dan efisiensi yang terbukti memiliki pengaruh paling kuat.

potensi daya tarik wisata, melainkan oleh kualitas tata kelola yang konsisten menerapkan prinsip *Good Governance*.

Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pelayanan publik yang cepat, perencanaan program yang tepat sasaran, serta pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel. (2) Pelaku usaha dan masyarakat lokal diharapkan meningkatkan partisipasi dalam forum perencanaan maupun pengawasan pengembangan wisata. Keterlibatan aktif ini akan memperkuat legitimasi kebijakan, menumbuhkan rasa memiliki terhadap destinasi, serta mendorong kepatuhan terhadap kewajiban retribusi dan pajak. (3) Akademisi dan peneliti disarankan untuk memperluas kajian di masa mendatang dengan menambahkan faktor eksternal, seperti dukungan infrastruktur, promosi digital, atau kebijakan investasi daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). Efektivitas penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kupang. *Jurnal Neo Societal*, 6(1), 36–37.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research* (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates.

- Ernawati. (2022). Pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 2(3), 13–23.
<https://doi.org/10.55606/jempper.v2i3.2122>
- Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. B. (2021). *Tourism: Principles, practices, philosophies* (13th ed.). Wiley.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage.
- Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. *Computational Statistics*, 28(2), 565–580. <https://doi.org/10.1007/s00180-012-0317-1>
- Kanalinspirasi. (2025, 12 Februari). Kadis Pariwisata Aceh Selatan: Angka kunjungan wisata meningkat. *Kanalinspirasi.com*.
<https://www.kanalinspirasi.com/news/kadis-pariwisata-aceh-selatan-angka-kunjungan-wisata-meningkat/>
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan pembangunan daerah: Teori dan aplikasi*. UPP STIM YKPN.
- Nurfaishal, N. (2018). Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai implementasi *Good Governance*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 123–134.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/9dc35>
- Sahira, N. I., & Zulkarnaini. (2023). *Tata Kelola Destinasi Wisata melalui Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar*. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 1(2), 55–63.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. Mandar Maju.
- Setokoe, T. J., Ramukumba, T., & Ferreira, I. W. (2019). Community participation in the development of rural areas: A leaders' perspective of tourism. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 8(1), 1–15.
- Suwanda, D. (2018). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(2), 113–123.
- Suwilma, N., & Abdi, A. W. (2022). Dampak pengembangan objek wisata Pantai Suak Geudubang terhadap perekonomian masyarakat Gampong Suak Geudubang, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 7(1), 43–53.
- Supriyanto, A., Kusbandrijo, B., & Widodo, J. (2024). Tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pacitan. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(1), 55–68.
<https://doi.org/10.55777/cakrawala.v18i1.972>
- Telfer, D. J., & Sharpley, R. (2019). *Tourism and development in the developing world* (2nd ed.). Routledge.
- United Nations ESCAP. (2009). *What is Good Governance?*
<https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>